

MODEL PERMINTAAN DAN ANALISIS LOKASI BANK UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS LITERASI-INKLUSI KEUANGAN BUS

Muhammad Nur Akbar, Azmi Ismail, Imron Natsir.

Email m.nur.akbar165@gmail.com

Universitas PTIQ Jakarta

Keyword

*financial literacy and
 inclusion, demand
 models, facility
 location*

Abstract

The sharia financial literacy index of the Indonesian population is still very low, at 9.14% in 2022 with a worrying financial inclusion index of 12.12%. The government through the OJK has issued several Strategies and Regulations related to increasing financial literacy and inclusion, the implementation of which is also carried out by Banks as Financial Services Business Actors (PUJK). The results of the OJK evaluation in 2020 showed that the percentage of PUJK compliance had only reached 79.09%, the amount of sharia financial education that was not yet a significant proportion of conventional financial education (2.86-3.57%) with an average increase that was also minimal (6.16%). In terms of the reach of activities, the implementation of financial education for 3 years (2018-2020) was still not evenly distributed in all regions and was more concentrated in Java and Bali (7,686 out of 12,906 activities). Sharia Banks based on POJK No. 3 of 2023 mandates the implementation of sharia financial literacy activities for consumers and/or the community as part of its annual program. Meanwhile, as a business entity, Sharia Banks are required to be oriented towards efficiency and profit in order to remain sustainable and able to develop their market share. This makes it necessary for Sharia Banks to rearrange their strategy for implementing financial literacy and inclusion activities so that they are in line with every business activity of the Bank. In this regard, Sharia Banks can set targets and priority areas for implementing sharia financial education and inclusion activities through business forecasting methods (multiple regression models) from a financial inclusion perspective and a location analysis approach (p-Median Model) in determining the optimal location of a business facility. The results of this method and approach are obtained by a product demand model (savings, deposits and sharia current accounts) which shows the factors that influence and contribute to the achievement of the amount of Third Party Funds (DPK) of Sharia Commercial Banks in Indonesia. In addition, through the simulation of determining the optimal location for Islamic Bank distribution channel facilities in the Kalimantan region, several solutions were obtained that minimize the total weighted distance of demand at selected facility locations based on three scenarios created. Although the problem of multicollinearity is still found in the regression model created, this model can still be used to explain the level and characteristics of the relationship between DPK variables and independent variables that are the priority targets for implementing Islamic

financial literacy and inclusion activities, namely the population of Students and Students, Islamic Financial Institutions, and Companies or Business Entity Customers.

Kata Kunci

literasi dan inklusi keuangan, model permintaan, lokasi fasilitas

Abstrak

Indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia masih sangat rendah, yakni berada di 9,14% pada tahun 2022 dengan capaian indeks inklusi keuangannya yang juga mengkhawatirkan di 12,12%. Pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan beberapa Strategi dan Peraturan terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang dalam pelaksanaannya turut dilakukan oleh Bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Hasil evaluasi OJK di tahun 2020 menunjukkan persentase kepatuhan PUJK baru mencapai 79,09%, jumlah edukasi keuangan syariah yang belum signifikan proporsinya terhadap edukasi keuangan konvensional (2,86-3,57%) dengan rata-rata peningkatan yang juga minim (6,16%). Dari sisi jangkauan kegiatan, pelaksanaan edukasi keuangan selama tiga tahun (2018-2020) masih belum merata di semua wilayah dan lebih terpusat di pulau Jawa dan Bali (7.686 dari 12.906 kegiatan). Bank Syariah berdasarkan POJK No. 3 Tahun 2023 diamanati pelaksanaan kegiatan literasi keuangan syariah kepada konsumen dan/atau masyarakat sebagai bagian dari program tahunannya. Sedangkan sebagai entitas bisnis, Bank Syariah dituntut untuk berorientasi pada efisiensi dan keuntungan agar tetap sustain dan mampu mengembangkan pangsa pasarnya. Hal ini menjadikan Bank Syariah perlu menata ulang strategi pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangannya agar selaras dengan setiap aktivitas bisnis Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Syariah dapat menetapkan sasaran dan wilayah prioritas pelaksanaan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan syariah melalui metode peramalan bisnis (model regresi berganda) dari perspektif inklusi keuangan dan pendekatan analisis lokasi (p-Median Model) dalam penentuan lokasi optimal suatu fasilitas bisnis seperti kantor cabang atau saluran distribusi lainnya. Hasil dari metode dan pendekatan ini diperoleh model permintaan produk (tabungan, deposito dan giro syariah) yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan berkontribusi pada pencapaian besaran Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu melalui simulasi penentuan lokasi optimal untuk fasilitas saluran distribusi Bank Syariah di wilayah Kalimantan, diperoleh beberapa solusi yang meminimalkan total jarak terboboti permintaan di lokasi-lokasi fasilitas terpilih berdasarkan tiga skenario yang dibuat. Meskipun masalah multikolinieritas masih dijumpai pada model regresi yang dibuat, namun model ini masih dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat dan karakteristik hubungan antara variabel DPK dengan variabel-variabel bebas yang menjadi sasaran prioritas pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah, yakni populasi Pelajar dan Mahasiswa, Institusi Keuangan Syariah, dan Perusahaan atau Nasabah Badan Usaha.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Literasi keuangan syariah penduduk Indonesia masih sangat rendah yakni 9,14% (artinya dari 100 orang penduduk terdapat hanya sekitar 9 orang yang well literate) di tahun 2022 berdasarkan survey yang dilakukan OJK. Meski mengalami kenaikan dari tahun 2019, namun dengan

mayoritas penduduknya yang beragama Islam, angka ini berbanding terbalik dengan indeks literasi keuangan (konvensional) yang berada di 49,68%. Capaian indeks inklusi keuangan syariah juga masih rendah yaitu sebesar 12,12% (artinya dari setiap 100 orang penduduk hanya terdapat sekitar 12 orang yang inklusif atau mempunyai akses terhadap layanan jasa keuangan) dan jauh tertinggal di bawah indeks inklusi keuangan konvensional yang sudah mencapai 85,10%.¹ Dua indeks keuangan syariah di atas cukup mengkhawatirkan jika mengingat Indeks Inklusi Keuangan yang ditargetkan Pemerintah Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024. Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Di tahun 2023 sendiri indeks inklusi keuangan Nasional sudah mencapai 88,7%.

Sebagai jalan mencapai target tersebut, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa Strategi, Peraturan, dan Surat Edaran terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan, yang pelaksanaannya dilakukan salah satunya oleh bank sebagai bagian dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Hasil evaluasi OJK atas implementasi strategi dan peraturan tersebut di tahun 2020 menunjukkan peningkatan persentase kepatuhan PUJK dalam penyampaian laporan realisasi kegiatan literasi keuangan dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, terdapat 1.661 PUJK (69,09%) dari total 2.404 PUJK yang telah menyampaikan laporan realisasi literasi keuangan dan di tahun 2020 meningkat menjadi 74,29% (1.786 PUJK).² Di tahun yang sama khusus sektor jasa keuangan yang berbentuk Bank Umum, persentase kepatuhan mencapai 79,09% yang berarti masih ada sekitar 20% PUJK yang belum menyampaikan laporan realisasi kegiatan tersebut.

Jika lebih spesifik di sektor keuangan syariah, maka data jumlah literasi dan edukasi keuangan yang dilakukan PUJK selama tahun 2018-2020 menunjukkan jumlah edukasi keuangan syariah yang belum signifikan proporsinya terhadap edukasi keuangan konvensional, yaitu berkisar di 2,86-3,57% dengan rata-rata peningkatan yang juga minim (6,16%).³ Dari sisi jangkauan kegiatan, pelaksanaan edukasi keuangan selama tiga tahun (2018-2020) masih belum merata di semua wilayah dan lebih terpusat di pulau Jawa dan Bali (7.686 dari 12.906 kegiatan) dengan 21 provinsi masih memiliki indeks literasi keuangan masyarakat di bawah rata-rata Nasional tahun 2019 (38,03%). Kegiatan literasi dan edukasi yang dilakukan PUJK sampai tahun 2019 masih sebagian besarnya menasar kelompok Pelajar dan Masyarakat Umum. Sedangkan kelompok masyarakat rentan dengan indeks literasi yang masih rendah, seperti Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Petani, Nelayan, Penyandang Disabilitas dan Masyarakat 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) belum menjadi bagian dari fokus sasaran edukasi.⁴

Bank Syariah, berdasarkan POJK No. 3 Tahun 2023, merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang diamanati pelaksanaan kegiatan literasi keuangan syariah kepada konsumen dan/atau masyarakat sebagai bagian dari program tahunannya. Amanah ini bersifat wajib, termasuk pelaporannya kepada OJK dan akan dikenakan sanksi administratif jika tidak ditunaikan. Di sisi lain sebagai entitas bisnis, Bank Syariah dituntut mendapatkan keuntungan agar tetap *sustain* dan mampu mengembangkan pangsa pasarnya. Oleh karena itu dalam setiap aktivitasnya,

¹ Direktur Humas OJK, *Siaran Pers Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hal. 1

² Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hal. 84

³ Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hal. 86

⁴ Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hal. 88

Bank harus mempertimbangkan faktor efisiensi dan imbal penerimaan (*profit oriented*). Tidak terkecuali dalam kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, Bank harus dapat mengaitkan kegiatan ini pada aspek bisnis, seperti peramalan permintaan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk.

Tujuan inklusi keuangan sendiri yang tercantum dalam Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 pada dasarnya menjurus pada peningkatan penggunaan atau pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang berdampak pada penambahan penerimaan PUJK atau Bank dan berujung pada peningkatan keuntungan. Contohnya pada tujuan inklusi keuangan dalam meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, yang berarti penambahan jumlah nasabah bank. Demikian pula pada tujuan meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, yang memiliki makna meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga. Tujuan-tujuan tersebut tidak jauh berbeda dengan kebanyakan misi sebagian besar bank. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank dalam tiga dimensi inklusi keuangan yang berbeda, yaitu akses, ketersediaan, dan penggunaan produk atau layanan bank.⁵ Hal tersebut menunjukkan pentingnya memastikan sistem keuangan inklusif bukan hanya merupakan tujuan pembangunan suatu negara, tetapi juga merupakan isu yang harus diprioritaskan oleh setiap bank karena dampak kebijakannya yang positif bagi stabilitas bank itu sendiri. Dalam arti lain, dengan andil bank melakukan kegiatan inklusi keuangan di suatu wilayah, maka sebenarnya bank sedang aktif meningkatkan kepercayaan, keuntungan, dan pertumbuhan inklusif bank itu sendiri, termasuk berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di wilayah tersebut.

Fakta-fakta di atas, yakni tuntutan yang besar dari pemerintah melalui OJK, tren kenaikan indeks literasi dan inklusi keuangan, khususnya syariah yang belum signifikan, serta realisasi strategi yang telah dijalankan, baik dari sisi kepatuhan yang belum maksimal, jumlah kegiatan yang masih minim, serta cakupan wilayah dan sasaran objek pelaksanaan kegiatan yang belum merata, terlebih pada sektor jasa keuangan syariah, menjadikan Bank Syariah dengan *nature* bisnisnya yang juga *profit oriented* perlu menata ulang strategi pelaksanaan kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan literasi serta kegiatan inklusi keuangan syariahnya. Apakah secara ekstrim Bank akan memanfaatkan seluruh sumber daya untuk pemenuhan target literasi dan inklusi ini tanpa mempertimbangkan aspek bisnis, atau Bank tidak melakukan sama sekali kegiatan edukasi yang tidak memberi keuntungan secara langsung. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa bentuk pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan dengan menghindari penggunaan merek serta penjualan produk dan/atau layanan tertentu. Di sisi lain sebagian besar bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan sarat dengan kebutuhan biaya, seperti pendampingan, program penjangkauan, pembangunan infrastruktur dan media, penambahan jaringan kantor, kerja sama dengan pihak lain, pengembangan saluran distribusi produk dan/atau layanan.

B. Identifikasi Masalah

Dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan beberapa program-program inisiatif termasuk *core actions* di dalamnya guna mencapai target literasi dan inklusi keuangan tersebut secara terencana dan bertahap. Disini OJK memberikan panduan bagi PUJK dalam mengembangkan strategi

⁵ Rakotoarisoa MHS, Tastaftiyan Risfandy dan Inas Nurfadia Futri, "Financial Inclusion and Bank Profitability: Evidence from Indonesia", dalam *Journal Accounting and Investment*, Vol. 23 No. 3, September Tahun 2022, hal. 409

pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi keuangan dengan tetap memperhatikan basis sasaran prioritas sehingga dapat ditentukan jenis materi dan bentuk edukasi yang akan diberikan kepada tiap sasaran objek pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasinya tersebut, serta mempertimbangkan pula basis wilayah prioritas sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi ini dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan serta memperkecil *gini ratio* beberapa wilayah tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah memperhatikan budaya dan kearifan lokal (demografi) dalam kaitan menentukan bentuk penyampaian atau komunikasi saat pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi tersebut.⁶

Bank Syariah sebagai salah satu PUJK dapat menerapkan panduan ini dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan edukasi untuk literasi maupun kegiatan inklusi keuangan syariahnya. Prioritisasi yang meliputi sasaran dan wilayah pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi hal yang penting serta mendesak untuk dilakukan mengingat adanya keterbatasan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank. Dengan memprioritaskan sasaran edukasi literasi dan inklusi keuangan, maka Bank dapat lebih fokus menggarap nasabah dan/atau calon nasabah yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja bisnis. Jika lebih dari satu sasaran yang ditargetkan di suatu periode, maka Bank dapat membuat urutan prioritas dalam rangka pengalokasian sumber daya serta metode penyampaian edukasi dan inklusi yang akan dikerahkan berdasarkan nilai potensi kinerja bisnis yang akan diperoleh, termasuk dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sasaran. Selain itu, dengan penyebaran populasi sasaran (nasabah dan/atau calon nasabah) di tiap wilayah dan mengingat keterbatasan sumber daya dan prioritas sebelumnya, maka perlu ditetapkan lokasi-lokasi potensial atau strategis yang dapat menjangkau seluruh atau sebagian besar sasaran literasi dan inklusi keuangan namun tetap berdasarkan perhitungan keekonomian bisnis.

Berdasarkan argumen manfaat dari melakukan prioritisasi pada tahap perencanaan pelaksanaan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan syariah di atas, maka parameter pencapaian tujuan inklusi keuangan (Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.07/2017) perlu diterjemahkan menjadi suatu parameter yang berhubungan dengan ukuran kinerja bank atau komponen penyusunnya, seperti jumlah Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Aset dsb. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi besaran indikator atau unsur kinerja Bank, seperti keberadaan (kuantitas) tiap sasaran pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang ditetapkan OJK dalam SNLKI 2021-2025 (Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda/i, Profesi, Karyawan, Petani dan Nelayan, Pekerja Migran Indonesia/PMI dan Calon PMI, UMKM, Penyandang Disabilitas, Masyarakat Daerah 3T, Perempuan/Ibu Rumah Tangga, Komunitas)⁷ beserta faktor potensial lainnya perlu diidentifikasi melalui pendekatan peramalan bisnis. Hasil peramalan terkait ukuran permintaan pasar ini tidak hanya membantu Bank dalam menyasar dan memprioritaskan sasaran kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah, melainkan dapat membantu Bank menentukan materi dan media yang akan digunakan dalam kegiatan sesuai karakteristik tiap sasaran prioritas. Tahap berikutnya, mengingat kegiatan edukasi dan inklusi keuangan harus dilakukan untuk menjaring sebanyak mungkin masyarakat di wilayah kerja PUJK, maka hasil dari model permintaan di atas digunakan lebih lanjut dalam analisis lokasi fasilitas untuk mendapatkan lokasi-lokasi optimal pelaksanaan kegiatan tersebut.

⁶ Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hal. 108

⁷ Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hal. 102

Pada penelitian tesis ini, penulis akan mengaplikasikan salah satu metode peramalan bisnis untuk membuat model yang mengukur potensi permintaan produk dan layanan BUS yang dibutuhkan oleh para individu sasaran pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi keuangan dalam SNLKI 2021-2025 di suatu daerah dengan turut mempertimbangkan faktor atau kriteria lain, sebagai basis menetapkan sasaran-sasaran prioritas pelaksanaan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan syariah. Selanjutnya jika model permintaan yang diperoleh tersebut layak digunakan untuk prediksi, penulis akan melakukan simulasi analisis lokasi berdasarkan *output* model ini untuk memfasilitasi Bank dalam menentukan lokasi-lokasi yang memiliki total jangkauan terendah untuk dijadikan pusat fasilitas kegiatan edukasi dan inklusi keuangan syariah pada beberapa wilayah. Pendekatan analisis lokasi dilakukan mengingat pelaksanaan kegiatan edukasi menurut penulis merupakan unsur dari strategi pemasaran bank, yaitu bagian *marketing mix* aspek *place* atau pada literatur lain tercakup dalam strategi saluran distribusi bank. Di Indonesia, saluran distribusi produk bank masih didominasi jaringan kantor meskipun berbagai dukungan seperti ATM, *internet banking*, *phone banking*, *mobile banking*, *mobile branch* dan *outlet* pihak ketiga sudah meningkat jumlah dan intensitas penggunaannya di era digital dewasa ini.⁸

Kerangka berpikir strategi pelaksanaan kegiatan edukasi atau literasi dan inklusi keuangan syariah oleh Bank Syariah sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat digambarkan pada skema berikut. Skema ini menggambarkan bagaimana penetapan sasaran dan wilayah prioritas pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis Bank Syariah itu sendiri, seperti pengambilan keputusan dalam strategi pemasaran, sehingga memberikan imbal hasil yang positif kepada bank selain dari pemenuhan aspek kepatuhan dari OJK.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka Bank Syariah dapat menetapkan sasaran dan wilayah prioritas pelaksanaan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan syariah melalui pembuatan model permintaan dari perspektif inklusi keuangan serta berdasarkan analisis lokasi yang umum digunakan dalam penentuan lokasi optimal suatu fasilitas bisnis (kantor cabang, pusat atau saluran distribusi). Melalui dua pendekatan tersebut, Bank tidak hanya dapat menysasar nasabah dan calon nasabah potensial yang berpeluang memberikan masukan atau tambahan penerimaan bagi Bank (kinerja bank), tetapi juga menetapkan lokasi yang dapat menangkap (*covering*) peluang pemanfaatan produk dan/atau layanan Bank (inklusi keuangan) dari berbagai wilayah secara efisien jika memang terdapat batasan jumlah minimal fasilitas saluran distribusi.

Prioritisasi yang dilakukan pemerintah melalui OJK dalam sasaran dan wilayah pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan pada dasarnya sejalan dengan ajaran Islam, yaitu dalam hal mendahulukan sesuatu yang penting, strategis dan dapat memberikan manfaat yang jauh lebih luas dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka masalah atau pertanyaan yang hendak dijawab dalam tesis pada dasarnya menunjukkan teknik-teknik statistik dan pemrograman matematis bagi Bank Umum Syariah dalam merumuskan dua dari tiga *core action* di atas, yaitu:

1. Bagaimana Bank Umum Syariah menentukan objek atau sasaran prioritas dari pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui model peramalan permintaan produk bank?

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal. 133

2. Bagaimana Bank Umum Syariah menentukan wilayah prioritas pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pendekatan analisis lokasi fasilitas untuk saluran distribusi bank?

Selanjutnya beberapa pembatasan masalah ditetapkan agar proses pemecahan masalah tetap terfokus pada ruang lingkup penelitian, disamping karena adanya keterbatasan dalam ketersediaan data yang diperoleh. Berikut beberapa pembatasan masalah yang diidentifikasi:

1. Besaran komponen kinerja Bank Umum Syariah sebagai salah satu indikator peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan (tujuan inklusi keuangan) dikelompokkan per struktur wilayah (provinsi dan kabupaten/kota).
2. Pembagian daerah penelitian dilakukan berdasarkan jumlah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia yang dianggap mewakili kebutuhan nasabah/calon nasabah terhadap produk dan/atau layanan jasa Bank.
3. Ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten/kota dijadikan sebagai titik calon lokasi saluran distribusi Bank dan pusat akumulasi kebutuhan nasabah/calon nasabah di daerah tersebut.
4. Biaya unit perjalanan per satuan jarak untuk kebutuhan akses nasabah/calon nasabah di suatu lokasi yang dilayani oleh fasilitas saluran distribusi Bank di lokasi tertentu tidak diketahui sehingga hanya digunakan besaran jarak tempuh antar lokasi tersebut (atau dibuat sebesar 1 Rupiah atau 1 USD per kilometer jarak tempuh untuk kebutuhan simulasi).
5. Jarak tempuh antar lokasi yang diamati diasumsikan sama untuk dua arah yang berlawanan (jarak atau waktu tempuh kedatangan dan kepulangan antara dua lokasi diasumsikan sama).
6. Jarak jangkauan tiap fasilitas yang terbentuk tidak dibatasi sehingga dapat melayani setiap daerah permintaan dengan berbagai nilai jarak tempuhnya.
7. Penentuan jumlah dan lokasi fasilitas saluran distribusi Bank tidak menyertakan pertimbangan biaya investasi karena belum dilakukan analisis biaya lebih lanjut.
8. Bentuk saluran distribusi yang telah dibuka diasumsikan tidak akan ditutup.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pada tesis ini ialah:

1. Merumuskan model permintaan produk-produk penghimpunan dana Bank Umum Syariah sebagai sumber Dana Pihak Ketiga melalui model regresi berganda.
2. Melakukan simulasi penentuan sejumlah lokasi fasilitas saluran distribusi dari Bank Umum Syariah menggunakan pendekatan analisis lokasi (*p-Median*).

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan Bank Umum Syariah mengadaptasi model permintaan terhadap sekelompok produk penghimpunan dana (tabungan, giro, deposito) tersebut, maka Bank tidak hanya dapat menetapkan sasaran prioritas pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah secara lebih objektif, namun lebih lanjut Bank akan mendapat imbal balik positif berupa pertumbuhan dan keberlangsungan Bank sesuai kontribusi tiap kelompok sasaran kegiatan, termasuk membantu Bank dalam menentukan *content* materi dan bentuk media atau saluran distribusi yang sesuai pada tiap sasaran prioritas. Selanjutnya melalui pendekatan analisis lokasi dalam menentukan wilayah prioritas pelaksanaan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan syariah, Bank dapat menetapkan lokasi atau beberapa lokasi tempat Bank mendirikan kantor cabang baru, mengalokasikan Agen-agennya, dan/atau sebatas menempatkan ATM secara efisien sebagai saluran-saluran distribusi Bank yang dengannya informasi dan akses produk dan/atau layanan jasa Bank dapat disalurkan dan dapat diterima oleh nasabah atau calon nasabah.

Lebih jauh diharapkan kegiatan-kegiatan edukasi dan inklusi yang sudah melalui paling tidak dua metode dimaksud, dapat memberi atau menambah *income* dan keuntungan Bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang, meningkatkan ekonomi masyarakat akibat dari meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan produk dan/atau layanan Bank di wilayah-wilayah tujuan edukasi dan inklusi keuangan syariah tersebut, mendukung target peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah dari pemerintah, serta turut andil dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara Nasional.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Data Penelitian

Data yang dibutuhkan terdiri dari data variabel terikat dan beberapa data variabel yang dianggap berpengaruh pada variabel terikat tersebut (variabel bebas).

1. Variabel Terikat

Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di tiap provinsi dijadikan sebagai data variabel tidak bebas atau variabel terikat dikarenakan besaran Dana Pihak Ketiga selain merupakan gambaran volume transaksi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai nasabah atas produk bank (simpanan giro, tabungan *wadiah*, investasi tabungan dan deposito), juga menjadi salah satu sumber utama untuk berbagai jenis pembiayaan bank syariah. Hal ini tidak lepas dari fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, sehingga jika semakin banyak dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, maka akan semakin meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ke masyarakat yang membutuhkan dana (pembiayaan). Semakin meningkatnya total pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga yang dijaga pada *range* rasio tertentu, maka akan menunjukkan kinerja keuangan bank yang semakin baik pula. Dengan demikian variabel terikat ini sudah mewakili dua komponen dari indikator kinerja keuangan bank syariah.

2. Variabel Bebas

Data variabel bebas ditentukan dengan mengadaptasi empat kategori faktor penting yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait lokasi fasilitas usaha ritel sebagaimana yang dikemukakan oleh McGoldrick (2002). Faktor-faktor ini kemudian diturunkan lagi beberapa di antaranya guna merinci lebih lanjut apa saja yang termasuk di dalam kategori variabel bebas tersebut.

B. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud ialah pengklasifikasian data yang dibutuhkan dalam penelitian dan cara memperoleh data-data tersebut. Komponen data yang diambil ini keseluruhannya merupakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber, baik dari OJK, Badan Pusat Statistik, Portal beberapa Kementerian dan sumber lain yang dianggap *reliable* dalam memenuhi kebutuhan penelitian. Data sekunder dimaksud terdiri dari:

1. Data besaran Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di tiap provinsi diperoleh dari “Statistik Perbankan Syariah - Desember 2023” yang diterbitkan oleh OJK.
2. Data jumlah setiap variabel populasi per provinsi diperoleh sebagai berikut:
 - a. Data jumlah Pelajar mulai dari SD sampai dengan SMA dan SMK di tiap provinsi diperoleh dari Portal Data Kemendikbudristek untuk tahun ajaran 2023/2024. Data jumlah Pelajar mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Madrasah Aliyah di tiap provinsi diperoleh dari Portal Kementerian Agama RI untuk tahun ajaran 2021/2022. Sedangkan data jumlah Mahasiswa diperoleh dari Portal Databoks terkait “Demografi Jumlah Mahasiswa Terdaftar di 34 Provinsi

Indonesia Tahun 2022”. Data jumlah mahasiswa terdaftar di 34 provinsi Indonesia tahun 2023 belum tersedia. Adapun data jumlah Pemuda/i tidak disertakan karena belum didapatkan data dengan pengklasifikasian dimaksud secara lengkap.

- b. Data jumlah Profesi tidak disertakan mengingat sudah diwakili oleh atau *redundant* dengan sebagian dari jumlah Karyawan, dengan pertimbangan bahwa karyawan juga memiliki tuntutan dan kesempatan yang sama dalam perolehan keprofesian.
- c. Data jumlah Karyawan diperoleh dari Portal Badan Pusat Statistik terkait “Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2023”.
- d. Data jumlah Petani diperoleh dari Portal Badan Pusat Statistik terkait “Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2023”. Sedangkan data jumlah Nelayan diperoleh dari Portal Statistik KKP terkait “Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Menurut Provinsi (orang)” tahun 2022 (data jumlah Nelayan tahun 2023 belum dapat diperoleh).
- e. Data jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) diperoleh dari Portal Satu Data Indonesia terkait “Rekapitulasi Data Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 (sd. Desember) berdasarkan Asal Provinsi PMI”. Sedangkan data jumlah Calon PMI tidak disertakan karena selain tidak tersedianya data yang lengkap, juga karena *redundant* dengan sebagian jumlah Karyawan, Pelajar dan populasi lainnya sebelum berstatus PMI.
- f. Data jumlah Penyandang Disabilitas tidak disertakan karena tidak tersedia atau belum didapatkan data yang lengkap atau representatif.
- g. Data jumlah Masyarakat Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal tidak disertakan karena sebagian sudah diwakili oleh beberapa kategori populasi yang lain di daerah yang sama, seperti jumlah Karyawan, Pelajar, Petani dan Nelayan, dan lainnya.
- h. Data jumlah Perempuan/Ibu Rumah Tangga diperoleh dari “Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Februari 2023” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
- i. Data jumlah Komunitas sesuai definisi pada SNLKI 2021-2025 tidak disertakan karena tidak tersedia atau belum didapatkan data yang lengkap atau representatif.
- j. Data jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah diperoleh dari Portal UMKM Indonesia.Id terkait “Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia”. Data tersebut merupakan data tahun 2022 karena untuk data tahun 2023 masih belum tersedia secara lengkap.
- k. Data jumlah Perusahaan sebagai *commercial potentials* merupakan kumulatif dari beberapa sektor yang masuk dalam kategori “Pihak Ketiga Bukan Bank Berdasarkan Lapangan Usaha” yang diberikan Pembiayaan dari BUS, dengan rincian sumber perolehan datanya sebagai berikut:
 - 1) Data jumlah Perusahaan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan diperoleh dari “Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
 - 2) Data jumlah Perusahaan Listrik, Gas dan Air diperoleh dari “Direktori Perusahaan Air Bersih, Listrik, dan Gas 2023” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
 - 3) Data jumlah Perusahaan Pertambangan dan Penggalian diperoleh dari “Direktori Perusahaan Pertambangan Besar 2023” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
 - 4) Data jumlah Perusahaan Konstruksi diperoleh dari “Direktori Perusahaan Konstruksi 2023” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
 - 5) Data jumlah Perusahaan Industri Pengolahan diperoleh dari “Direktori Industri Manufaktur Indonesia 2023” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

- 6) Data jumlah Perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran diperoleh dari “Profil Perdagangan Indonesia 2022” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
- 7) Data jumlah Penyedia Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum disini hanya diwakilkan dengan data jumlah Hotel dari “Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2023” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
Pihak Ketiga Bukan Bank lainnya seperti; Perantara Keuangan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Kemasyarakatan dan Perorangan, serta Badan Internasional tidak disertakan karena keterbatasan data.
1. Data jumlah Penyedia Jasa Pendidikan sebagai *social potentials* disini hanya diwakilkan dengan data jumlah Sekolah (mulai SD/setara s.d. SMA/setara) dan Perguruan Tinggi dari “Statistik Indonesia 2023” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
- m. Data jumlah Penyedia Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial disini hanya diwakilkan dengan data jumlah Rumah Sakit dari “Statistik Indonesia 2023” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
3. Data total panjang jalan per luas wilayah di tiap provinsi yang menggambarkan aksesibilitas diperoleh dari Portal Badan Pusat Statistik terkait “Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km), 2022” serta “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2021”.
4. Data jarak tempuh antar kandidat lokasi fasilitas diperoleh dari perhitungan antar koordinat *latitude* dan *longitude* masing-masing pusat ibu kota provinsi atau kabupaten/kota menggunakan metrik jarak *Great Circle* atau jarak terpendek pada permukaan bola bumi.
5. Data jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diperoleh dari “Statistik Perbankan Syariah - Desember 2023” yang diterbitkan oleh OJK.

C. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan terbagi sesuai tujuan penelitian, yaitu pembuatan model permintaan produk-produk bank sebagai sumber Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah dan simulasi penentuan lokasi fasilitas saluran distribusi pada Bank Syariah yang keduanya berfungsi sebagai metode penetapan sasaran dan wilayah prioritas pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

1. Pembuatan model permintaan potensial produk bank
Pada pembuatan model ini, tahapan yang dilakukan pada dasarnya ialah mengikuti tahapan secara umum dalam analisis model regresi berganda. Hasil dari tahapan ini berupa model permintaan terhadap produk-produk Bank Umum Syariah sebagai sumber Dana Pihak Ketiga yang memperlihatkan faktor-faktor apa saja beserta bobot pengaruhnya terhadap potensi besaran nilai permintaan tersebut per provinsi. Jika model tersebut valid dan layak sebagai prediktor, maka nilai potensi permintaan di tiap provinsi atau kabupaten/kota untuk satu tahun ke depan dapat diprediksi dan digunakan sebagai *input* bobot tiap daerah pada penentuan lokasi fasilitas saluran distribusi Bank Syariah, baik di tingkat provinsi atau turun ke tingkat kabupaten/kota dan seterusnya.
2. Simulasi penentuan lokasi fasilitas saluran distribusi bank
Proses simulasi penentuan lokasi-lokasi potensial untuk tempat fasilitas saluran distribusi ditentukan berdasarkan kebijakan pihak perusahaan dengan melihat potensi masing-masing wilayah atau daerah yang berupa tingkat permintaan, baik terprediksi atau berdasarkan data *history*, jumlah lokasi yang direncanakan, serta beberapa kriteria pemilihan lokasi yang dikemukakan pada teori lokasi fasilitas sebelumnya. Hal-hal tersebut dijadikan sebagai bahan

pertimbangan agar dapat menyerap kebutuhan nasabah atau calon nasabah serta mendukung kelancaran mobilitas sumber daya bank dalam menjalankan fungsinya. Selain besaran tingkat permintaan di setiap lokasi, nilai-nilai jarak antar lokasi yang diperoleh juga dijadikan sebagai input model lokasi-alokasi.

Pada kasus pengadaan atau pembukaan fasilitas bank yang baru seperti Kantor Cabang Pembantu (KCP), data jumlah serta lokasi kantor pusat dan kantor cabang yang sudah ada (fasilitas awal) dapat dijadikan sebagai batasan dalam simulasi. Disini akan digunakan *p-Median model* untuk memformulasikan lokasi-lokasi potensial dimaksud. Melalui model ini perhitungan untuk setiap nilai jumlah fasilitas tertentu (p) yang ditentukan oleh pihak bank dilakukan, mulai dengan menyertakan jumlah fasilitas awal p_0 (initial sitting) jika ada dan kemudian dilanjutkan dengan perhitungan untuk setiap jumlah fasilitas akhir yang ditentukan. Perhitungan ini akan menghasilkan nilai-nilai fungsi objektif untuk dianalisis lebih lanjut pada tahap berikutnya.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data didahului dengan deskripsi data, baik data statistik pada model regresi berganda yang digunakan, maupun penjelasan beberapa data variabel serta data lainnya yang terlibat dalam analisis lokasi. Adapun analisis data pada model permintaan yang terbentuk, dilakukan berdasarkan beberapa hasil pengujian statistik. Sedangkan analisis data pada simulasi penentuan lokasi fasilitas di bank yang dijadikan contoh dilakukan berdasarkan beberapa skenario jumlah lokasi fasilitas yang dihendak dibuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, baik berupa data variabel terikat maupun variabel bebas yang telah diidentifikasi sebelumnya, diperoleh data lengkap di 33 provinsi dari keseluruhan 38 provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan dua hal utama. Pertama, hampir di keseluruhan variabel penelitian untuk provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya tidak tersedia datanya. Sedangkan penyebab kedua adalah provinsi Kalimantan Utara yang tidak disertakan pada penelitian karena data variabel terikat di provinsi ini bernilai nol. Adapun untuk data jarak tempuh antar daerah kandidat lokasi fasilitas saluran distribusi bank hanya diperoleh dan disajikan melalui aplikasi SITAION Version 5.8.0.19 (Mark S. Daskin, 2007) yang digunakan dalam analisis lokasi.

2. Pengolahan Data

a. Pembuatan model permintaan

Setelah diperoleh data dari beberapa variabel di atas, kemudian dilakukan pembuatan model permintaan melalui analisis model regresi berganda guna mengetahui hubungan antar variabel-variabel tersebut. Pada tahap ini semua variabel bebas dan terikat dimasukkan dalam persamaan regresi melalui salah satu metode estimasi fungsi regresi, lalu dihitung signifikansi variabel-variabel tersebut pada persamaan yang terbentuk. Hasil perhitungan akan memperlihatkan variabel bebas mana yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Metode yang digunakan dalam mengestimasi persamaan atau fungsi regresi berganda pada penelitian ini adalah pendekatan kuadrat terkecil melalui perhitungan “*single step*” yang memasukkan seluruh variabel dalam model. Metode *single step* ini dipilih karena akan dijelaskan terlebih dulu tingkat hubungan antara tiap sasaran pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan (termasuk faktor lainnya) terhadap proyeksi potensi permintaan produk-produk bank sebagai sumber Dana Pihak Ketiga. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kegunaan model regresi, yaitu menjelaskan seberapa penting sebuah variabel bebas mempengaruhi nilai prediksi atas variabel terikat. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan sarana software IBM SPSS Statistics Version 27.

Tabel dan gambar ringkasan dari *output* SPSS berikut ini memperlihatkan beberapa besaran nilai statistik yang dapat menjelaskan tingkat signifikansi dan kualitas dari model permintaan yang terbentuk, mulai dari nilai korelasi antar variabel sampai visualisasi data untuk kebutuhan analisa lebih lanjut.

Berdasarkan data yang di dapat, maka persamaan regresi berganda untuk permintaan produk-produk pengumpulan dana BUS (sumber DPK) menggunakan metode *single step* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = - 6811,432531 + 0,000215 PM + 0,000237 KY - 0,007521 PN \\ - 0,155951 PMI + 0,003748 IRT - 0,009358 UMKM + 16864,177891 AK \\ + 0,426339 PR + 123,542788 KU - 177,230187 RS + 1,229623 SK$$

dengan:

Y	= tingkat permintaan produk pengumpulan dana BUS untuk DPK
PM	= jumlah Pelajar dan Mahasiswa
KY	= jumlah Karyawan (usia 15 tahun ke atas)
PN	= jumlah Petani dan Nelayan
PMI	= jumlah Pekerja Migran Indonesia
IRT	= jumlah Ibu Rumah Tangga

UMKM = jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah
AK = data Aksesibilitas (km/km²)
PR = jumlah Perusahaan sektor-sektor tertentu
KU = jumlah Instansi Keuangan Syariah
RS = jumlah Rumah Sakit
SK = jumlah Sekolah (SD s.d. SMA/setara) dan Perguruan Tinggi

Berdasarkan data yang di dapat bahwa model regresi tidak cukup layak digunakan untuk prediksi karena sebagian data berpencar di atas dan di bawah titik nol (mendekati poin 5 dan -5). Bahkan terdapat 1 data yang sangat jauh dari titik nol atau berbeda dari mayoritas data lainnya (outlier).

b. Penentuan lokasi fasilitas potensial

Berdasarkan hasil pengolahan data di tahap sebelumnya, maka *output* model regresi di atas belum dapat dijadikan sebagai prediktor yang menghasilkan nilai potensi permintaan di tiap provinsi atau kabupaten/kota untuk penentuan lokasi fasilitas saluran distribusi di suatu Bank Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk kebutuhan simulasi penentuan lokasi fasilitas saluran distribusi salah satu Bank Syariah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tingkat permintaan produk penghimpunan dana sebagai bobot tiap Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan akan diambil dari data Total Dana Pihak Ketiga BUS berdasarkan Kabupaten/Kota pada Desember 2023.⁹

Pada dasarnya Bank Syariah dapat terlebih dulu menentukan lokasi-lokasi potensial sebagai kandidat-kandidat lokasi didirikan atau diadakannya sebagai fasilitas saluran distribusi. Kandidat-kandidat lokasi ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi potensial, seperti berdasarkan wilayah dengan permintaan yang cukup besar (potensial) baik yang terprediksi maupun aktual, akses yang mudah ke jalan raya maupun jalan arteri, diadakannya Kantor Pusat Bank Syariah atau Kantor Cabang Utama yang telah ada sebagai salah satu lokasi terpilih (required location) sehingga tidak dapat diganti atau dipindahkan, dan pertimbangan lainnya. Jika diasumsikan bahwa penentuan lokasi di wilayah ini merupakan penentuan lokasi fasilitas pertama dari suatu Bank Syariah yang memang belum memiliki sama sekali fasilitas kantor sama sekali, maka dapat dilakukan beberapa skenario jumlah fasilitas yang hendak diinisiasi/dibuka di wilayah tersebut.

C. Pembahasan Hasil

1. Sasaran Prioritas Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS)

Dari hasil analisis di atas berdasarkan model permintaan produk Bank Umum Syariah (tabungan, deposito, giro) yang terbentuk melalui model peramalan bisnis, dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut:

- a. Bank Syariah secara individu dapat membuat model permintaan produk BUS melalui model peramalan bisnis dengan melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti demografi populasi, baik masuk dalam kategori *potential customer* (nasabah perorangan) maupun *commercial* dan *social potentials* (nasabah badan usaha/non perorangan). Hal ini dapat dibuktikan dari 4 populasi (Pelajar dan Mahasiswa, Perusahaan, Keuangan, dan Rumah Sakit) yang “konsisten” tetap berada di 3 persamaan regresi yang dibuat sebelumnya. Tidak hanya lolos melalui tahapan metode estimasi yang digunakan, tetapi juga konsisten dengan arah pengaruhnya yang positif untuk 3

⁹ Departemen Pengelolaan dan Data Statistik, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024, hal. 76

populasi (Pelajar dan Mahasiswa, Perusahaan, dan Keuangan), dan berpengaruh negatif pada populasi RS.

- b. Meskipun secara statistik masih diduga adanya masalah multikolinieritas dan belum menunjukkan kelayakan model sebagai prediktor, namun model ini masih dapat digunakan sesuai fungsinya untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran nilai DPK yang diperoleh. Model dianggap cukup dapat menjelaskan (melalui nilai korelasi dan signifikansi koefisiennya) bahwa populasi Pelajar dan Mahasiswa, Perusahaan dan Institusi Keuangan Syariah di suatu wilayah memberi pengaruh atau berdampak positif terhadap nilai DPK. Dengan kata lain, semakin besar jumlah ketiga populasi tersebut di suatu provinsi, maka akan diperoleh nilai DPK yang besar pula di provinsi tersebut. Adapun populasi Rumah Sakit yang berdampak negatif dapat dijadikan evaluasi lebih lanjut mengenai pola transaksi yang terjadi antara BUS dengan Rumah Sakit. Termasuk evaluasi pola data RS yang memang memiliki gejala multikolinieritas yang paling tinggi di antara populasi lainnya.
- c. Program-program tabungan bagi Pelajar dan Mahasiswa yang notabene belum berpenghasilan dan digiatkan sejak usia dini (jargon rajin menabung, dsb.) dapat menjadi sebab perolehan DPK dari populasi ini. Terlebih dengan adanya Sekolah Agama mulai dari jenjang Raudhatul Athfal (setara TK) sampai dengan Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama dapat menjadi pendorong gerakan menabung di Bank Syariah. Potensi ini seharusnya dapat dilihat oleh BUS sebagai peluang untuk peningkatan DPK. Adapun Perusahaan sebagai Badan Usaha yang memiliki orientasi profit, tentunya memiliki dana-dana yang perlu di simpan di Bank sebagai bagian dari performa kinerjanya.
Hal tersebut menjadi jalan masuk bagi BUS untuk lebih proaktif dalam menawarkan produk deposito dan giro badan usaha ke populasi Perusahaan tersebut. Adapun Institusi Keuangan Syariah, baik yang berbentuk Bank maupun Non Bank (IKNB atau LKBB) merupakan sarana bagi BUS dalam menjalankan beberapa usaha bisnisnya, seperti pasar modal, dsb. Namun yang utama adalah keberadaan entitas tersebut yang turut ambil bagian dalam kegiatan inklusi keuangan syariah, termasuk edukasi literasi yang diwajibkan pemerintah. Dengan semakin banyaknya populasi Keuangan di suatu wilayah, maka seharusnya ini menjadi sebab meningkatnya inklusi keuangan yang berdampak pada DPK dan kinerja BUS. Alih-alih sebagai kompetitor, Institusi Keuangan Syariah justru dapat dijadikan sebagai *partner* usaha dan ekosistem keuangan syariah.
- d. Dari model di atas, BUS dapat melakukan prioritisasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah kepada populasi berikut (sesuai urutan):
 - 1) Institusi Keuangan Syariah, di antaranya melalui kerjasama model-model transaksi keuangan antara institusi.
 - 2) Perusahaan, seperti kerjasama dalam memfasilitasi pembayaran upah, menawarkan produk-produk investasi yang sesuai bagi karyawan dan kebutuhan Perusahaan, edukasi cakap keuangan bagi karyawan dsb.
 - 3) Pelajar dan Mahasiswa (salah satu dari 10 sasaran pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi keuangan), dengan masuk melalui program-program menabung, edukasi investasi syariah dll.
- e. BUS tidak hanya dapat melakukan kegiatan edukasi literasi terhadap populasi-populasi yang memberikan pengaruh positif di atas, tetapi juga kepada beberapa populasi lainnya, meskipun secara model belum masuk sebagai faktor yang berpengaruh besar dan signifikan terhadap perolehan DPK. Contohnya adalah Karyawan yang memiliki jumlah total populasi di tahun 2023 lebih dari 50 juta jiwa. Hal ini dapat dilakukan simultan dengan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang ditujukan ke Perusahaan karena disana tempat Karyawan melakukan aktivitasnya. Selanjutnya adalah RS yang dengannya Bank Syariah dapat bekerja sama, baik dalam

aspek transaksi keuangan yang terkait dengan Karyawan dari RS atau memfasilitasi RS itu sendiri sebagai nasabah Badan Usaha.

- f. Di satu sisi model permintaan yang dihasilkan ini dapat dilihat sebagai gambaran terkait *market share* industri perbankan syariah yang masih sebesar 7,44% dari total perbankan nasional. Angka tersebut naik dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 7,09%. Pencapaian pembiayaan dari perbankan syariah sendiri di tahun 2023 sebesar Rp585,46 triliun atau tumbuh 15,72%, sementara DPK sebesar Rp684,52 triliun atau tumbuh 10,49% dibandingkan tahun 2022.¹⁰ Belum tercakupnya beberapa sasaran atau populasi dalam model yang terbentuk dapat dikatakan sesuai dengan statistik pada laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2023 di atas. Jumlah tiap populasi yang besar di tiap wilayah belum mencerminkan kontribusinya terhadap DPK BUS karena memungkinkan sekali populasi-populasi dimaksud masih menjadi nasabah sebagai besar Bank Konvensional sehingga besarnya jumlah beberapa populasi tidak berpengaruh sama sekali atau pun kurang signifikan terhadap besarnya permintaan produk BUS. Dapat diinterpretasikan pula bahwa besarnya DPK saat ini sebagai besar lebih berasal dari kontribusi Lembaga atau Institusi Keuangan Syariah itu sendiri dalam mensosialisasikan program, produk dan layanan perbankan syariah. Diikuti dengan hasil kerja BUS yang masuk ke Perusahaan-perusahaan untuk menawarkan kerjasama keuangan termasuk pembiayaan dan berikutnya adalah dampak literasi keuangan syariah yang diperoleh dari Pelajar dan Mahasiswa, khususnya pada institusi pendidikan di bawah pengawasan Kementerian Keuangan, yang diperkirakan berdampak pada peningkatan jumlah nasabah dan penghimpunan dana Bank Syariah.
- g. Ditinjau dari aspek fiqh prioritas, masa tidak keliru jika BUS selaku subjek, pemeran utama atau aktor dari penggiat dan penggerak perbankan syariah inilah yang pertama harus memulai dari entitasnya sendiri, bekerja lebih, tidak mengandalkan keberadaan konsumen semata, dan perlu memprioritaskan riset dan perencanaan dalam memasarkan produk dan jasa keuangan kepada segmen dan target pasarnya. Dari sisi objek atau nasabah Bank, maka Perusahaan sebagai populasi prioritas pertama yang memberi dampak signifikan pada perolehan DPK BUS, tentu merupakan populasi strategis karena selain dari jumlahnya yang besar, di dalamnya terdapat perputaran uang atau aset, baik dari nasabah badan usaha maupun perorangan yang tidak lain adalah para Karyawan Perusahaan tersebut.

Karyawan yang memperoleh upah ini tidak serta merta langsung akan menghabiskan pendapatannya, tetapi akan ada alokasi sebagian yang dijadikan simpanan untuk keadaan atau kebutuhan tidak terduga, pembelanjaan terencana di kemudian hari, atau untuk investasi. Disinilah peran Bank masuk memberikan edukasi dan menawarkan produk dan layanannya. Selanjutnya para Karyawan dan Pengusaha yang memiliki komunitas dan keluarga dapat atau memungkinkan sekali untuk melakukan induksi literasi keuangan syariah kepada lingkungannya (pasangan, anak, orang tua, rekan, dan yang lainnya) sehingga prospek peningkatan nasabah yang inisiasinya dari populasi Perusahaan ini dapat diperoleh. Inilah yang dimaksud dengan prioritasasi dalam perbuatan yang luas manfaatnya.

Pelajar dan Mahasiswa masuk ke dalam populasi yang memiliki pengaruh karena selain karena faktor dari lingkungan keluarganya di atas, juga karena pembelajaran terkait keuangan syariah sudah masuk dalam kurikulum pendidikan mereka, terutama para siswa dan mahasiswa dari institusi pendidikan di bawah Kementerian Agama.

¹⁰ Departemen Perbankan Syariah, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024, hal. 16

2. Wilayah Prioritas Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS)

Dari analisis terhadap hasil simulasi penentuan lokasi-lokasi optimal di wilayah Kalimantan untuk pendirian/pembukaan saluran distribusi Bank Syariah, dapat ditarik beberapa interpretasi sebagai berikut:

- a. Bank dapat menggunakan *p-Median Model* sebagai salah satu algoritma atau *tool* dalam analisis lokasi potensial atau optimal untuk pemilihan dan penetapan letak fasilitas saluran distribusinya. Hal ini ditunjukkan dengan validnya model tersebut dalam meminimalkan total jarak yang terboboti permintaan di tiap lokasi-lokasinya. Contohnya dalam skenario 4 fasilitas, maka ketika ditentukan bahwa lokasi yang dipilih salah satu atau bahkan seluruhnya berbeda dari hasil di atas, maka akan menghasilkan total jarak terboboti permintaan atau rata-rata jarak terboboti yang lebih besar dari pada pilihan 4 fasilitas di Pontianak, Banjarmasin, Kalimantan, dan Samarinda (> 50,696319 km). Dalam arti lain, jika biaya pembukaan fasilitas baru dan satuan biaya perjalanan diasumsikan sama, maka akan menghasilkan biaya investasi dan operasional yang lebih tinggi.
- b. Hasil dari beberapa skenario jumlah fasilitas di atas dapat berubah pada saat digunakan data Permintaan yang berbeda, baik dari hasil prediksi maupun *real* data DPK pada periode tertentu yang ditetapkan untuk digunakan. Selain itu untuk kasus dimana BUS telah memiliki Kantor Pusat atau Kantor Cabang di salah satu atau beberapa lokasi, maka dengan kebijakan bahwa fasilitas yang telah ada tidak boleh ditutup, otomatis hal ini dapat merubah komposisi lokasi-lokasi fasilitas terpilih. Contohnya sejak awal skenario ditetapkan bahwa titik Permintaan di Tarakan ditetapkan sebagai lokasi yang harus ada karena akan menangani kebutuhan permintaan produk dan layanan bank di wilayah Kalimantan Utara kepulauan dan sekitarnya. Disini *p-Median Model* tetap dapat mengakomodir kebutuhan fasilitas *initials* dan menghitung lokasi optimal berdasarkan batasan yang diberikan tersebut.
- c. Lokasi-lokasi optimal pada simulasi di wilayah Kalimantan ini masih bersifat umum atau masih berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada prakteknya, pemilihan lokasi sudah merujuk lebih detil pada letak lokasi di Kecamatan atau administrasi wilayah/kluster daerah yang lebih kecil lagi. Saat ini beberapa BUS telah memiliki Kantor Cabang, bahkan KCP di tingkat Kecamatan atau dalam satu Kabupaten/ Kota memiliki beberapa fasilitas saluran distribusi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diidentifikasi terlebih dulu dan turun lebih detil lagi ke total atau potensi Permintaan di lokasi-lokasi fasilitas yang telah ada, termasuk cakupan layanannya dalam menangani nasabah di beberapa titik daerah.
- d. Pada simulasi di atas, maka Bank Syariah yang menyasar operasionalnya di wilayah Kalimantan, dapat memprioritaskan pendirian/pembukaan atau bahkan fasilitas tertentu di lokasi terpilih tersebut sebagai tempat pelaksanaan berbagai program kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah, seperti pendirian beberapa ATM, KCP, dsb. Dalam skenario 6 fasilitas, Bank Syariah dapat memilih 6 lokasi tersebut dibandingkan lokasi atau Kabupaten/Kota lain karena selain secara model sudah terbukti, juga secara *real* di lapangan lokasi-lokasi ini adalah Ibu Kota provinsi yang memang secara Permintaan sudah memiliki nilai yang besar. Contohnya BSI yang saat ini belum memiliki Kantor Cabang di provinsi Kalimantan Utara (<https://www.bankbsi.co.id/jaringan>), maka dengan melihat potensi Permintaan dan strategi bisnisnya ke depan, dapat memanfaatkan hasil simulasi ini sebagai referensi pemilihan lokasinya.
- e. Dengan melakukan prioritisasi pada lokasi-lokasi fasilitas yang dapat mencakup lokasi-lokasi Permintaan lainnya secara optimal, maka pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat dilakukan secara lebih terstruktur, masih dan terencana berdasarkan alokasi sumber daya di tiap lokasinya. Seperti di skenario 5 fasilitas, maka tiap-tiap lokasi terpilih akan menjadi

tempat pusat kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah, baik yang bersifat *offline* maupun *online* dengan jangkauan, baik dari sisi nasabah, calon nasabah, maupun petugas Bank Syariah adalah yang terdekat dari pada kluster lokasi fasilitas lain di luar hasil model. Demikian pula secara kegiatan riset Bank Syariah untuk perencanaan pemasaran bank maupun kegiatan inklusi keuangan lainnya, Bank dapat melakukannya secara lebih terarah dengan *clustering* atau pengelompokkan pada lokasi-lokasi tersebut.

- f. Dalam kasus belum berimbangnya total permintaan per lokasi fasilitas, hal ini dapat ditangani dengan tingkatan fasilitas yang dibuka, seperti pilihan antara KCP atau KC yang memiliki kapasitas operasional atau otorisasi pengelolaan produk dan layanan perbankan yang lebih besar.
3. Prioritisasi Sasaran dan Wilayah Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dalam Perspektif Islam

Adanya upaya melakukan riset potensi Permintaan produk dan jasa BUS di tiap wilayah menunjukkan diterapkannya prioritisasi studi dan perencanaan dalam suatu urusan yang pada dasarnya diajarkan oleh syariah. QS. Ar-Rahman [55]: 7-9 “*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*” menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak selalu berada dalam satu tingkat yang sama sehingga diperlukan neraca untuk menyikapi dan mengelolanya secara adil. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa Allah *Ta’ala* meletakkan neraca keadilan secara mantap agar manusia tidak melampaui batas dalam mengukur dan menakar segala persoalan, baik terhadap pihak lain maupun diri sendiri, sehingga tegaklah secara sempurna timbangan atau neraca keadilan tersebut.¹¹

Wahbah Az-Zuhaili mengaitkan QS. Ar-Rahman [55]: 7-9 dengan QS. Al-Hadid [57]: 25 “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*” dan QS. Asy-Syu’ara [26]: 182 “*dan timbanglah dengan timbangan yang lurus*” sebagai penegasan bahwa keadilan di bumi merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah *Ta’ala* dan manusia diharuskan untuk berkomitmen terhadap keadilan tersebut dengan cara yang benar, jujur serta larangan untuk berlaku sebaliknya, yaitu bertindak zalim, melampaui batas dan berbuat curang dalam menimbang atau memposisikan sesuatu, karena hal itu dapat melebihi-lebihkan atau mengurangi batas-batas yang seharusnya serta merugikan pihak lain.¹² Imam Al-Qurthubi menyebutkan makna lain dari *Al-Mizan* pada QS. Ar-Rahman [55]: 7 dalam tafsirnya yaitu sebagai syariat dari Allah *Ta’ala* dan juga dalam arti Al-Qur’an. Sedangkan kata *Al-Qisth* dalam ayat selanjutnya diartikan dengan makna lainnya sebagai *Al-Hukm* atau hukum. Imam Al-Qurthubi mengutip perkataan Qatadah tentang ayat di atas, “*Adillah wahai anak Adam, sebagaimana kamu senang diperlakukan dengan adil dan sempurna adalah sebagaimana kamu senang diperlakukan secara sempurna. Sesungguhnya adil itu membawa maslahat kepada manusia.*”¹³

Keadilan yang banyak diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya ini merupakan salah satu tujuan yang disasar dari dilakukannya prioritisasi karena akan mempengaruhi tindak

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Tangerang: Lentera Hati, 2000, Volume 13, hal. 499

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2013, Jilid 14, hal. 231

¹³ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Jilid 3 hal. 520, 521, 523

lanjut yang akan dikenakan pada objek-objek yang ditimbang atau diukur melalui studi, riset atau perencanaan (neraca) tersebut. Dalam konteks prioritas sasaran kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah, maka wilayah dengan *real* maupun potensi Permintaan produk dan jasa BUS yang tinggi akan diberikan saluran distribusi yang lebih besar atau masif dibandingkan wilayah yang *real* maupun potensi Permintaannya lebih rendah.

Lebih jauh, tujuan dari proses prioritas sasaran dan wilayah pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan oleh BUS ini sesuai dengan beberapa standar dan rumusan praktis dalam fiqh prioritas, di antaranya:¹⁴

a. Hajat jangka panjang sebelum hajat jangka pendek

Pemilihan lokasi-lokasi optimal untuk fasilitas BUS merupakan bentuk memprioritaskan kebutuhan jangka panjang dibandingkan kebutuhan jangka pendek. Hal tersebut tergambar dengan potensi berkembangnya jumlah Permintaan produk dan jasa BUS melalui pendirian berbagai jenis saluran distribusi pada wilayah strategis yang mencakup Permintaan di wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan bertambahnya jumlah Permintaan termasuk nasabah BUS, maka dapat menambah literasi dan inklusi masyarakat yang lebih luas pada praktek keuangan syariah. Jika BUS tidak mengambil inisiatif di atas atau hanya berfokus pada Permintaan dari wilayah *existing*, maka kecil kemungkinan perluasan pangsa pasar BUS diraih. Hal ini tidak hanya karena Bank menafikan faktor-faktor yang secara empiris mempengaruhi Permintaan produk dan jasa Bank dalam strateginya, tapi juga karena besar kemungkinan kompetitor atau Bank Umum sudah lebih dulu menggarap konsumen di wilayah lainnya. Beberapa ulama kontemporer mengungkapkan standar fiqh prioritas ini dengan pernyataan “(Lebih) mendahulukan maslahat jangka panjang yang kuat daripada maslahat saat ini tetapi lemah.”¹⁵

b. Memilih aktivitas yang lebih bermanfaat

Standar fiqh prioritas ini tidak jauh berbeda dengan standar sebelumnya dengan penekanan pada besarnya dampak maslahat (kebaikan, manfaat) dari suatu pilihan. Melalui estimasi bobot tiap faktor yang mempengaruhi Permintaan produk dan jasa BUS, sebenarnya hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan gambaran jumlah nasabah dan kandidat di setiap wilayah, sehingga jenis materi, program beserta jumlahnya yang lebih banyak dan/atau lebih intens dapat dirumuskan dan diprioritaskan lebih dulu untuk wilayah-wilayah yang potensi atau nilai Permintaannya lebih besar dibanding wilayah lainnya. Melalui analisis lokasi juga diperoleh wilayah-wilayah tersebut berpeluang besar sebagai kandidat utama dan bahkan dapat menjadi lokasi final saluran distribusi BUS. Dalil memilih aktivitas yang lebih bermanfaat berdasarkan di antaranya pesan Rasulullah *‘alaihi ashshalatu wa assalamu*:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَخْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدَ عَنْهُ جُوعًا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا...¹⁶

“Orang yang paling dicintai Allah swt. adalah orang yang paling berguna di antara mereka dan perbuatan yang paling dicintai Allah swt. ialah kegembiraan yang dimasukkan ke dalam diri orang Muslim, atau menyingkirkan kegelisahan dari diri mereka, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Dan sungguh aku berjalan bersama saudaraku sesama Muslim untuk suatu keperluan (da'wah) lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid selama satu bulan.” (HR. Ibnu Abi Ad-Dunya)

c. Membina individu dan basis sosial

¹⁴ Oni Sahroni, *Ini Dulu Baru Itu: Fiqh Prioritas*, Jakarta: Gema Insani, 2020, hal. 39, 43, 94, 114, 185

¹⁵ Oni Sahroni, *Ini Dulu Baru Itu: Fiqh Prioritas*, Jakarta: Gema Insani, 2020, hal. 41

¹⁶ Abdurrahman ibn Abi Bakr Jalaluddin As-Suyuthi, *Shahih wa Dha'if Al-Jami' Ash-Shaghir wa Ziyadatuhu*, Asy-Syamilah, 1431 H, no. hadits 176

Penetapan sasaran prioritas pelaksanaan edukasi menjadi salah satu bentuk dalam upaya membina individu dan sosial terkait literasi dan inklusi keuangan syariah. Dengan program yang diamanatkan Pemerintah kepada BUS tersebut, maka tiap individu dan masyarakat yang tersentuh kegiatan ini menjadi “melek” terhadap berbagai bentuk aktivitas keuangan syariah, ikut terlibat di dalamnya, dan pada akhirnya diharapkan akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan negara. Contoh individu dan sosial disini adalah beberapa sasaran kegiatan dari model Permintaan yang terbentuk, yaitu Pelajar, Mahasiswa, dan Karyawan baik dari Institusi Keuangan Syariah maupun nasabah Perusahaan. Dengan peran aktif BUS melalui edukasi dan penyediaan akses serta produk dan jasanya, kiranya para da’i dapat semakin terbantu dalam membumikan fiqih muamalah khususnya aspek transaksi keuangan kepada umat. Dalil standar ini antara lain berdasarkan firman Allah *Ta’ala*:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ

“*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (QS. Ar-Ra’ad [13]: 11)

d. Terencana dan terukur

Dapat dipastikan bahwa rangkaian proses penentuan model Permintaan produk dan jasa BUS serta analisis lokasi saluran distribusi BUS di suatu wilayah merupakan suatu aktivitas dan proses yang terencana dan terukur dalam rangka menetapkan sasaran dan wilayah prioritas bagi pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Pada proses ini disertakan berbagai referensi (literatur dan penelitian terdahulu) sebagai acuan, paramater-parameter sebagai pertimbangan, dan tentunya kumpulan data yang relevan untuk menghasilkan tujuan tersebut. Dengan cakupan studi kasus pada BUS di wilayah kepulauan Kalimantan yang luas, maka dituntut pula informasi yang representatif dan analisa yang sistematis (terencana dan terukur) sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan sesuai tujuan penelitian dan dipertanggungjawabkan. Dalil anjuran untuk aktivitas yang dilakukan secara terencana dan terukur berdasarkan di antaranya pesan Rasulullah *‘alaihi ashshalatu wa assalamu*:

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ يُحِبُّ إِذَا عَمَلٌ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقَنَهُ...¹⁷

“*Sesungguhnya Allah jalla wa ‘azza menyukai jika kalian melakukan sesuatu pekerjaan itu dilakukan dengan rapi.*” (HR. Abu Al-Azhar)

e. Seimbang dan proporsional

Berangkat dari perintah Allah *Ta’ala* melalui QS. Ar-Rahman [55]: 7-9 untuk menegakkan keadilan melalui pertimbangan dalam merencanakan dan menjalankan suatu aktivitas, maka yang tergambar dari hasil akhir penentuan model permintaan produk dan analisis lokasi fasilitas ini adalah lokasi-lokasi optimal saluran distribusi BUS. Lokasi optimal disini dimaknai sebagai lokasi tempat fasilitas BUS yang secara proporsional mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat terhadap produk dan jasa yang disediakan melalui usaha seminimal atau semudah mungkin dalam mengakses fasilitas tersebut. Dapat dikatakan seimbang oleh kedua pihak, baik dari sisi BUS maupun masyarakat, karena dalam mencapai kemudahan tersebut, fasilitas harus mampu melayani sesuai dengan tingkat kebutuhan yang teridentifikasi oleh BUS serta mudah dicapai oleh para konsumen atau masyarakat di sekitar lokasi yang membutuhkannya.

Dalil standar fiqih prioritas ini antara lain berdasarkan firman Allah *Ta’ala*:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ

¹⁷ Abu Bakar Al-Baihaqy, *Syu’ab Al-Iman*, Riyadh: Maktabah Ar-Rusy li An-Nasyr wa At-Tauzi’, 1423 H, juz 7, hal. 233, no. hadits 4931

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

A. Kesimpulan

1. Bank Umum Syariah (BUS) dapat menentukan objek atau sasaran prioritas dari pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui model peramalan permintaan produk bank dengan cara melakukan terlebih dulu identifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap permintaan produk sumber Dana Pihak Ketiga (sebagai variabel terikat). Kemudian BUS melakukan salah satu metode peramalan bisnis, yaitu model regresi berganda dengan memasukkan variabel-variabel yang telah teridentifikasi tersebut sehingga diperoleh persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antar variabel. Uji statistik dan analisa regresi berganda dilakukan untuk mendapatkan validasi dan tingkat signifikansi model.
2. Dari model regresi berganda diperoleh persamaan berikut:
$$Y = -165,335 + 115,947 KU + 0,003 PM - 77,712 RS + 0,257 PR$$
dengan Y adalah besaran Dana Pihak Ketiga, KU adalah jumlah Institusi Keuangan Syariah, PM adalah jumlah Pelajar dan Mahasiswa, RS adalah jumlah Rumah Sakit, dan PR adalah jumlah Perusahaan di suatu lokasi.
3. Persamaan di atas memberi gambaran bahwa populasi Pelajar dan Mahasiswa, Perusahaan dan Institusi Keuangan Syariah di suatu wilayah memberi pengaruh atau berdampak positif terhadap nilai Dana Pihak Ketiga BUS di wilayah tersebut. Sedangkan populasi Rumah Sakit yang berdampak negatif dapat dijadikan evaluasi lebih lanjut mengenai pola transaksi yang terjadi antara BUS dengan Rumah Sakit. Keempat populasi dapat dijadikan oleh Bank sebagai sasaran prioritas kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah, disamping populasi lainnya.
4. Bank Umum Syariah (BUS) dapat menentukan wilayah prioritas pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pendekatan analisis lokasi fasilitas untuk saluran distribusi bank. Penelitian ini memberikan contoh simulasi penerapan salah satu metode analisis lokasi (*p-Median Model*) dan menghasilkan lokasi-lokasi yang optimal secara perhitungan matematis untuk beberapa skenario jumlah fasilitas BUS di wilayah Kalimantan pada tingkat Kabupaten/Kota.
5. Dari simulasi penentuan lokasi pada kasus dan skenario 4, 5, dan 6 fasilitas BUS di atas diperoleh hasil berupa solusi optimal lokasi fasilitas saluran distribusi BUS di wilayah Kalimantan yang menghasilkan *Total Demand Weighted Distance* dan *Average Weighted Distance* terkecil di antara pilihan kelompok/kombinasi lokasi lainnya untuk tiap skenario tersebut.

B. Implikasi Hasil Penelitian

1. Model regresi atau persamaan permintaan produk BUS memungkinkan lebih dapat menjelaskan atau bahkan dapat berfungsi sebagai prediktor pada saat variabel-variabel bebas, khususnya variabel populasi yang ditentukan, dapat lebih mencerminkan pengelompokan populasi yang memiliki kecenderungan terhadap produk syariah atau segmentasi produk tersebut di pasar. Dengan variabel yang lebih spesifik dan mempertimbangkan data historis kelompok nasabah, maka diharapkan variabel-variabel bebas dapat signifikan memainkan fungsinya sehingga dapat membantu pengambil keputusan dalam menerapkan sejumlah strategi terkait bauran pemasaran, tidak terkecuali dalam membidik sasaran kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
2. Penentuan lokasi fasilitas saluran distribusi BUS dalam dapat lebih faktual pada saat beberapa asumsi dikurangi atau bahkan dihilangkan sesuai kondisi nyata yang dihadapi entitas BUS dalam penetapan lokasi fasilitas yang optimal, seperti biaya investasi dan biaya unit perjalanan yang perlu diperhitungkan dalam model lokasi-alokasi yang digunakan.

C. Saran

3. Perlu melakukan evaluasi data yang akan diambil sebagai sampel untuk meminimalkan masalah multikolinieritas, termasuk melakukan model regresi berganda dengan DPK di tingkat wilayah yang lebih kecil atau di salah satu Bank Syariah untuk mendapat gambaran populasi maupun faktor lain yang lebih homogen agar dihasilkan model permintaan produk yang lebih layak (Model Fit) sebagai prediktor.
4. Perlu menerapkan perhitungan lokasi optimal pada studi kasus di Bank Syariah tertentu dengan memasukkan variabel biaya dan kebijakan Bank yang terkait pemilihan lokasi/fasilitas, untuk mendapat gambaran yang lebih nyata atas hasil-hasil yang diperoleh pada simulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, sekaligus memberikan solusi optimal yang dapat langsung diterapkan di Bank tersebut.

REFERENSI

- Adiandari, Ade Maharini. *Pengantar Literasi Keuangan*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2022.
- Ahmad, Gatot Nazir. *Manajemen Operasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Akyuwen, Roberto. Waskito, Jaka. *Memahami Inklusi Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Badan Pusat Statistik. *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2021*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2021.html?year=2021>.
- Badan Pusat Statistik. *Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km), 2022*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/U0VOeFZEZFNiVnByUkdGMlNrOTFVVGRHY1ZkVGR6MDkjMw==/panjang-jalan-menurut-provinsi-dan-tingkat-kewenangan-pemerintahan--km---2022.html?year=2022>.
- Badan Pusat Statistik. *Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIyNSMx/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-provinsi-dan-status-pekerjaan-utama--2023.html>.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Baihaqy, Abu Bakar. *Sy'ab Al-Iman*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusy li An-Nasyr wa At-Tauzi', 1423 H.
- Başar, Ayfer. Kabak, Özgür. Topçu, Y. İlker. Bozkaya, Burçin. *Location Analysis in Banking: A New Methodology and Application for a Turkish Bank*. Springer International Publishing Switzerland, 2015.
- Daskin, Mark S. *Network and Discrete Location: Models, Algorithms, and Applications*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2013.
- Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- Departemen Pengelolaan dan Data Statistik. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.
- Departemen Perbankan Syariah. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.
- Deputi Bidang Statistik Produksi. *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Jumlah Siswa RA, MI, MTs dan MA*. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-siswa-ra,-mi,-mts-dan-ma>.
- Direktorat Statistik Distribusi. *Profil Perdagangan Indonesia 2022 Volume 4*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Direktorat Statistik Industri. *Direktori Perusahaan Air Bersih, Listrik, dan Gas 2023 Volume 9*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Direktorat Statistik Industri. *Direktori Perusahaan Pertambangan Besar 2023 Volume 15*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Direktorat Statistik Industri. *Direktori Perusahaan Konstruksi 2023 Buku I: Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Volume 16*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Direktorat Statistik Industri. *Direktori Industri Manufaktur Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Februari 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. *Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2023 Volume 38*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Direktur Humas OJK. *Siaran Pers Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.
- Goworek, Helen. McGoldrick, Peter. *Retail Marketing Management: Principles and Practice*. Harlow: Pearson Education Limited, 2015.
- Hair, Joseph F. Black, William C. Babin, Barry J. Anderson, Rolph E. *Multivariate Data Analysis*. Hampshire: Cengage Learning EMEA, 2019.
- Haksever, Cengiz. Render, Barry. *Service and Operations Management*. Singapore: World Scientific Publishing, 2018.
- Hamsar, Dzulfiani. Astuty, Sri. Ma'ruf, Muhammad Imam. *Analisis Permintaan Pembiayaan pada Bank Syariah di Sulawesi Selatan*. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ja'fi, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari. *Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah shallallahu 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Dar Thauq An-Najah, 1422H.
- Kartajaya, Hermawan. Sula, M. Syakir. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan, 2006.
- Katadata Media Network. *Ini Jumlah Mahasiswa di Indonesia dan Sebarannya pada 2022*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/19/ini-jumlah-mahasiswa-di-indonesia-dan-sebarannya-pada-2022>.
- Khan, Falak. Siddiqui, Muhammad Ayub. Imtiaz, Salma. *Role of financial literacy in achieving financial inclusion: A review, synthesis and research agenda*. Cogent Business & Management Journal, 2022.
- Lensink, Robert. Hamilton, Calumn. Adjasi, Charles. *Advanced Introduction to Financial Inclusion*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2022.
- Lusardi, Annamaria. Messy, Flore-Anne. *The importance of financial literacy and its impact on financial wellbeing*. Journal of Financial Literacy and Wellbeing, 2023.

- Makridakis, Spyros. Wheelwright, Steven C. McGee, Victor E. *Forecasting: Methods and Applications*. Canada: John Wiley & Sons, Inc., 1983.
- MHS, Rakotoarisoa. Risfandy, Tastaftiyan. Futri, Inas Nurfadia. *Financial Inclusion and Bank Profitability: Evidence from Indonesia*. Journal Accounting and Investment, Vol. 23 No. 3, September, 2022.
- Muhamad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.
- Naisaburi, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar bi Naqlil 'Adadi 'an Al-Adl ila Rasulillah shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi.
- Portal Data Kemdikbudristek. *Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi*. <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/detail/6/L0-000000/2023/SD-1#filter-section>.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Robbani Press, 1998.
- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Riyanto. Mulyono, Sri. *Peramalan Bisnis dan Ekonometrika*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2019.
- Ruston, Gerard. *Optimal Location of Facilities*. West Virginia University, 2020.
- Sahroni, Oni. *Ini Dulu Baru Itu: Fiqih Prioritas*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Santoso, Singgih. *Panduan Lengkap SPSS 27: Cara Praktis Mengolah Data Statistik dengan Cepat dan Tepat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2023.
- Satu Data Indonesia. *Rekapitulasi Data Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 (sd. Desember) berdasarkan Asal Provinsi PMI*. <https://katalog.data.go.id/dataset/rekapitulasi-data-penempatan-pmi-tahun-2023-berdasarkan-asal-provinsi-pmi>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- Statistik – kkp. *Data Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Menurut Provinsi*. <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer-kpda>.
- Suryani, Tatik. *Manajemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global: Menciptakan Nilai Unggul untuk Kepuasan Nasabah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Sutanto, Herry. Umam, Khaerul. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Suyuthi, Abdurrahman ibn Abi Bakr Jalaluddin. *Shahih wa Dha'if Al-Jami' Ash-Shagir wa Ziyadatuhu*. Asy-Syamilah, 1431 H.
- Syaifullah, Muhammad. Anwari, M. Khairul. Akmal, Muhammad. *Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Asset Quality, Earnings, Liquidity, dan Sharia Conformity*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah ibn Musa ibn Adh-Dhahak. *Sunan At-Turmudzi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Bab Al-Halabi, 1975.
- UMKM Indonesia.Id. *Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>.
- Widyaningsih, Novita. Hersugondo. *Inklusi Keuangan dan Profitabilitas Bank di Indonesia*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), Volume 12 Nomor 2, Edisi Khusus, Agustus 2021.
- Zainal, Veithzal Rivai. Djaelani, Firdaus. Basalamah, Salim. Yusran, Husna Leila. Veithzal, Andria Permata. *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

